

## Pandangan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* Tentang Imbalan *Nādhir* Dari Hasil Pengelolaan Harta Wakaf

Oleh : Tgk. Nainunis, S. HI, MA

### ABSTRAK

*Nādhir* merupakan pengelola harta wakaf yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya manfaat harta wakaf. Di samping kewajibannya, seorang *nādhir* juga berhak mendapatkan imbalan dari hasil harta wakaf. Imbalan *nādhir* dapat disesuaikan dengan ketentuan pewakaf atau ditetapkan oleh hakim. Tulisan ini mengkaji tentang imbalan *nādhir* terhadap hasil pengelolalaan harta wakaf telaah *Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Hasil penelitian ini adalah pandangan *Fiqh al-Syāfi'iyyah* tentang imbalan *nādhir* terhadap hasil pengelolalaan harta wakaf adalah jika imbalan itu disyaratkan pewakaf, *nādhir* boleh mengambil imbalan secara mutlak sebagaimana ditentukan dalam syarat walaupun melebihi imbalan *mitsil* selama *nādhir* bukanlah pewakaf, kalau *nādhir* adalah pewakaf, maka hanya boleh mengambil imbalan *mitsil* atau lebih kurang lagi. Sedangkan imbalan yang ditetapkan oleh hakim adalah sekurang-kurang dari nafkahnya atau imbalan *mitsil*.

**Key Word :** *Fiqh Al-Syāfi'iyyah, Nadhir, Pengelolaan, Wakaf*

### A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial.<sup>1</sup> Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat sudah lama melembaga di Indonesia. Selain itu wakaf juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi orang yang mewakafkan (*wākif*) walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dengan dianjurkannya wakaf, maka tidak sedikit orang yang mempunyai kelebihan harta bendanya kemudian menginfestasikan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah SWT melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk.

Wakaf juga sebagai usaha pembentukan watak kepribadian seorang muslim untuk melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Perannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan termasuk di antara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam. Dengan demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan.

Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat Islam merupakan tanah wakaf. Bahkan banyak sarana pendidikan, rumah sakit dan sarana kepentingan umum lainnya merupakan tanah wakaf, dan jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Mengingat bahwa fungsi dari harta wakaf merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada dasarnya tujuan dari perwakafan itu sendiri adalah untuk mempergunakan manfaat dari harta wakaf dalam kebaikan, baik kebaikan dalam hal peribadatan maupun sosial dengan dasar ajaran agama Islam. Tingkat kemanfaatan dari perwakafan dapat dipengaruhi oleh nilai manfaat yang terkandung di dalam benda wakaf itu sendiri, kekekalan benda wakaf, maupun juga dapat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf (*nādhir*).

Menjaga manfaat dari harta yang telah diwakafkan merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat beban amanah dari seorang *wākif*. Menurut para ulama pahala wakaf sama halnya dengan pahala dari amal jariyah, di mana pahalanya tetap berlanjut walaupun orang yang meyedekahkan hartanya tersebut sudah meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له. (رواه المسلم).<sup>2</sup>  
Artinya: Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila manusia meninggal dunia, niscaya terputuslah amalannya, kecuali

*tiga perkara: yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh yang mendoakan kepadanya". (H.R. Muslim).*

Hadis di atas menyatakan bahwa amal orang yang telah meninggal akan terputus, kecuali semasa hidupnya pernah melakukan amalan yang bersifat kekal, walaupun amalan tersebut sekarang orang lain yang melakukan, namun balasannya tetap mengalir. Para ulama berpendapat bahwa sedekah jariah yang terdapat dalam hadis tersebut adalah harta wakaf.<sup>3</sup>

*Nādhir* sebagai orang dipercaya sebagai pengelolaan harta wakaf ini sangat menentukan apakah tercapai atau tidaknya tujuan dari wakaf ini. Peran *nādhir* sangat menentukan berjalan atau tidaknya harta wakaf, karena peran *nādhir* adalah top sebagai menejer yang menentukan, mengendalikan, manejerial perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil guna tergantung pada *nādhir* itu sendiri. Keberadaan harta wakaf itu ada di tangan *nādhir*, yang dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah SWT.

Oleh karena demikian, dalam pelaksanaan wakaf, *nādhir* mempunyai kewajiban dan hak tersendiri. *Nādhir* berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh *wakīf*. Sebagai pemegang amanat pada dasarnya *nādhir* tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaan *nādhir* sendiri.<sup>4</sup>

Di samping kewajibannya, seorang *nādhir* juga berhak mendapatkan imbalan dari hasil usaha wakaf produktif yang ia kelola dan kembangkan. Hal ini berdasarkan praktek sahabat Umar ibn Khatab RA dan Ali ibn Abu Thalib RA. Begirtu pula dalam *Fiqh al-Syāfi'iyyah*, *nādhir* berhak mendapat imbalan dari hasil usaha harta wakaf yang telah dikembangkan. Adapun besarnya berbeda satu sama lain sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diembankan. Tetap sesuai dengan ketentuan *wakīf*, jika *wakīf* tidak menetapkan, maka ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para pengelola/ manajemen wakaf yang ada. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fath al-Mu'in*, yaitu.

ويجوز للناظر ما شرط له من الاجرة وإن زاد على أجرة مثله، ما لم يكن الواقف. فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له. نعم: له رفع الامر إلى الحاكم ليقرر له الاقل من نفقته وأجرة مثله - كولي اليتيم - وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم.<sup>6</sup>

Artinya: Boleh bagi nādhir mengambil imbalan sesuai dengan ketentuan wakīf, walaupun lebih dari ukuran imbalan mitslī selama nādhir bukanlah wakīf itu sendiri. Jika wakīf tidak menetapkan, maka nādhir tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun nādhir dibolehkan melapor kepada hakim supaya ditetapkan sekurang-kurang imbalan atau imbalan mitslī, seperti wali anak yatim. Ibnu Shibāgh berfatwa bahwa nādhir dibolehkan mengambil imbalan sendiri tanpa melapor kepada hakim.

## B. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *mashdar* atau kata jadian dari kata kerja “*waqafa*” yang pada dasarnya mempunyai arti menahan sesuatu di jalan Allah SWT.<sup>6</sup> Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.<sup>7</sup> Dalam definisi wakaf menurut bahasa ini maknanya menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (benda), seperti menjual, mewariskan dan menghibahkan serta mentraksasikannya, maka setelah dijadikan harta wakaf, tidak boleh tidak, hanya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan pewakaf atau individual lainnya.

Sedangkan pengertian wakaf menurut istilah (hukum), para ulama *Fiqh Syāfi'iyah* telah mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan pendapat masing-masing. Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, misalnya mendefenisikan wakaf sebagai berikut:

حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على ان يصرف في جهة خير تقربا الى الله تعالى.<sup>8</sup>

Artinya: Wakaf adalah menahan harta tertentu sekaligus harta tersebut bisa dipindahkan kepemilikan kemudian mungkin diambil manfaat serta harta itu tetap kekal dan terputus hubungan pemanfaatan siwākif pada hartanya, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pengertian wakaf lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT

Sedangkan menurut Zain al-Din al-Malibarī mendefenisian wakaf sebagai berikut:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة.<sup>9</sup>  
*Artinya: Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih kekal seperti semula dengan cara memutuskan pemindahan kepemilikana, untuk diserahkan kepada tujuan yang mubah dan jihad.*

Pengertian wakaf ini lebih menekankan pemanfaatannya, yaitu menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih kekal seperti semula dengan cara memutuskan pemindahan kepemilikana, untuk diserahkan kepada tujuan yang mubah dan jihad.

Helmi Karim menyebutkan bahwa wakaf yang aslinya ditulis *waqf* telah dipakai sebagai salah satu peristilahan perundang-undangan di Indonesia, yang aslinya berasal dari bahasa Arab. Kata *al-waqf* sama artinya dengan *al-habs* yakni seseorang menahan harta yang dimilikinya dan tidak memakai serta tidak memindahkan miliknya. Secara sederhana dapat pula dikatakan bahwa wakaf menurut bahasa berarti "menahan harta, tidak dipindah milikkan".<sup>10</sup>

Dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>11</sup>

Adapun definisi wakaf menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wākif* (pewakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>12</sup> Melihat undang-undang tersebut, pemerintah telah melakukan perkembangan hukum wakaf dalam produk kebijaksanaan hukumnya. Sehingga kelahiran undang-undang tersebut merupakan hasil kebijakan Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan setting

sosial pada saat ini. Tetapi pruduk hukum Indonesia ini secara substansi tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dikarenakan walaupun undang-undang tersebut ada yang tidak sesuai dengan *Fiqh al-Syāfi'iyah*, namun paling tidak telah mengikuti *Fiqh Māikiyyah* yang membolehkan wakaf berjangka waktu.

Dari beberapa definisi wakaf di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf menurut istilah adalah penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*) di jalan Allah SWT. Maksud menahan *dzat* (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Maka wakaf merupakan pemindahan hak kepemilikan suatu harta benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari ridha Allah SWT.<sup>13</sup>

### C. Dasar Hukum Wakaf

Salah satu lembaga yang dianjurkan dalam Islam untuk dipergunakan seseorang sebagai penyalur harta yang dimilikinya adalah wakaf. Sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur'an, hadis, ijtihad (interpretasi mujtahid) dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas serta jelas mengenai wakaf. Al-Qur'an hanya menyebut dalam artian umum., bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para ulama *Fiqh* yang menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang sedekah, infak dan amal jariyah. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup didalam cakupan ayat tersebut. Di antara ayat tersebut adalah seperti dalam:

#### a. Surat Āli 'Imrān ayat 92:

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. (آل عمران: ٩٢)  
Artinya: Kamu tidak akan menĉapai kebaikan sehingga kamu menafkahkan sebagian harta kamu yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui. (Āli 'Imrān [3]: 92).<sup>14</sup>

Kebanyakan dari ulama berpendapat mengenai makna البر dalam ayat di atas adalah pahala kebaikan. Artinya seseorang akan mendapat balasan (pahala) kebaikan jika seorang muslim mampu memberikan harta yang paling dicintainya.

b. Surat Al-Hajj ayat 77,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ازْكُرُوا مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (الحج: ٧٧)  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Al-Hajj [22]: 77).<sup>15</sup>

Para ulama menafsirkan berbuat kebajikan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah termasuk wakaf.

c. Surat Al-Baqarah ayat 262,

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (البقرة: ٢٦٢)  
Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berserah hati. (Al-Baqarah [2]: 262).<sup>16</sup>

Ayat ini khusus menjelaskan infak kepada orang lain atau kepada suatu lembaga yang dibolehkan pada jalan Allah SWT, Karena diturunkan ayat ini pada saat Usman bin Affan RA dan Abdurrahman bin 'Auf RA menginfak di jalan Allah SWT dengan menyiapkan tentara pada perang tabuk beserta seribu unta sekaligus pelananya dan membekali tentara tersebut dengan seribu dinar. Sementara Abdurrahman bin 'Auf RA bersedakah setengah dari pada hartanya. Tujuan dari sahabat Rasulullah SAW untuk mengharap ridha dan pahala di sisi Allah SWT dengan catatan tidak menyebut-nyebut setelah memberi dan tidak menyakiti perasaan si penerima.

Al-Qur'an menyebutkan secara umum tentang memberikan harta kepada pihak lain, akan tetapi dalam hadis ada yang menyebutkan secara khusus dan umum tentang hal tersebut. Hadis-hadis yang menyinggung dasar hukum disyariatkannya wakaf sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, adalah hadis yang berkenaan dengan amal jariyyah, seperti:

a. Hadis Muslim:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انتقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له. (رواه المسلم)<sup>17</sup>

*Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila manusia mati terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh yang mendoakan kepadanya". (H.R. Muslim).*

Hadis di atas bermakna amal orang yang telah meninggal terputus pahalanya, kecuali semasa hidupnya pernah melakukan amalan yang bersifat kekal tidak akan putus pahalanya, walaupun amalan tersebut sekarang orang lain yang melakukan, namun pahalanya tetap mengalir kepadanya disebabkan amalnya sewaktu masih hidup. Para ulama berpendapat, sedekah *jariyyah* yang terdapat dalam hadist dipertanggungjawabkan kepada wakaf, dan anak yang shaleh dipertanggungjawabkan kepada orang Islam.<sup>18</sup>

b. Hadis Bukhari Muslim:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصاب عمر ارضا بخيبر فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يست امره فيها فقال : يا رسول الله اني اصببت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فمات امرني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر : انها لاتبع ولا تهب ولا تورث ؟ وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. (رواه الشيخان)

*Artinya: Dari Ibnu 'Umar RA., dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya?" Maka kata Rasulullah SAW kepadanya: "Jika engkau suka, tahanlah tanah ini, dan engkau sedekahkan manfaatnya." Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara*

*yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap tanah itu miliknya sendiri. (H.R Bukhari Muslim).*<sup>19</sup>

Hadis ini jelas sekali menggambarkan tentang hukum wakaf berdasarkan perbuatan seorang sahabat Rasulullah SAW melalui anjurannya, dan juga dapat kita pahami dalam hadist ini kemana tempat yang mesti diwakafkan, bagaimana benda tersebut setelah menjadi harta wakaf dan tidak berdosa orang yang mengurusinya mengambil sedikit dari kehasilan harta wakaf tersebut. Dari hadis Ibn 'Umar RA itu, ada beberapa garis penting mengenai aturan dalam berwakaf, yaitu:

- 1) Harta wakaf itu tidak dialihkan pemilikannya kepada orang lain, baik dengan cara menjualnya, mewariskan atau menghibahkannya. Artinya wakaf merupakan perbuatan menahan *dzat* (asal) benda hanya milik Allah SWT, sehingga tidak dapat dialihkan pemilikannya dalam bentuk apapun.
- 2) Harta wakaf itu digunakan untuk amal kebajikan.
- 3) Harta wakaf dapat dipelihara atau dikelola oleh orang atau badan hukum tertentu, di Indonesia disebut *nādhir*.
- 4) Bagi pengelola harta wakaf dapat mengambil sebahagian harta wakaf untuk keperluan dalam mengurusnya dan tidak berlebihan.
- 5) Harta yang akan diwakafkan itu hendaklah yang tahan lama atau dapat diambil manfaatnya dalam waktu lama.<sup>20</sup>

Di Indonesia selain bersumber kepada agama, juga bersumber pada hukum positif, yang merupakan hasil pemikiran pakar hukum di Indonesia. Bila inventarisir sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang mengatur masalah perwakafan. Namun, aturan yang telah dihasilkan masih terbatas pada perwakafan tanah milik.

#### **E. Rukun dan Syarat Wakaf**

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dan disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu Para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun,

wakaf tidak dapat berdiri sendiri atau wakaf tidak sah.

Sesuai dengan hukum Islam, maka untuk adanya wakaf harus dipenuhi empat unsur (rukun), yaitu adanya orang yang berwakaf (*wākif*) sebagai objek wakaf, adanya benda yang diwakafkan (*mauqūf*), adanya penerima wakaf (*mauqūf 'alaih*) sebagai subjek wakaf, dan adanya akad atau pernyataan (ikrar) penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat wakaf.

a. Orang yang berwakaf (*wākif*)

Yang dimaksud dengan pewakaf (*wākif*) adalah pemilik harta benda yang telah melakukan perbuatan hukum. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila *wākif* mempunyai kecakapan untuk melakukan "*tabarru'*" yakni melepas hak milik tanpa mengharapkan imbalan materil. Kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan *tabarru'* di sini meliputi empat kriteria yaitu:

- 1) Merdeka, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.
- 2) Berakal sehat/sempurna, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap dalam melakukan akad serta tindakan lainnya.<sup>21</sup>
- 3) Dewasa (*balīgh*), dalam hukum Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya, yaitu *balīgh* dan *rasyīd*. Pengertian *balīgh* menitikberatkan pada usia, sedangkan *rasyīd* pada kematangan pertimbangan akal. Wakaf yang dilakukan anak yang belum dewasa (*balīgh*) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap dalam melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
- 4) Tidak berada di bawah pengampuan, baik karena boros atau lalai. Karena orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan tidak sah.

b. Harta yang diwakafkan (*Mauqūf*)

Barang atau benda yang diwakafkan (*mauqūf*) haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
- 2) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya).
- 3) Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan *wākif* dan bebas dari segala beban.
- 4) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal, harus diusahakan agar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usah-usaha maksiat lainnya.<sup>22</sup>

c. Penerima Wakaf (*Mauqūf'alaih*)

Yang dimaksud dengan *mauqūf'alaih* adalah orang atau badan hukum atau tempat-tempat ibadah yang berhak menerima dari harta wakaf. Adapun Syarat-syarat *mauqūf'alaih* ialah:

1. Harus dinyatakan secara tegas/jelas dikala mengikrarkan wakaf kepada siapa/apa ditujukan wakaf itu.
2. Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan balasan dari Allah SWT.<sup>23</sup>

d. Akad wakaf (*shighat*)

Tentang *shigha* wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh Jumhur Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para ulama *Fiqh* menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf.

Ikrar wakaf yang diucapkan pemberi wakaf pada umumnya sebagai berikut "saya wakafkan harta saya ini kepada madrasah pulan untuk dipakai pembelanjaan dan penyelenggaraannya" atau "saya wakafkan kebun kelapa ini untuk digunakan hasilnya bagi penyelenggaraan yayasan yatim piatu pulan" dan sebagainya. Pada umumnya kata qabul hanya diperuntukkan kepada wakaf perorangan, tetapi bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan adanya lafadz

*qabūl* (penerimaan), cukup dengan ikrar penyerahan saja.<sup>24</sup>

Di samping rukun-rukun wakaf tersebut di atas, ada pula syarat-syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya.
- 2) Tujuannya seperti disebutkan di atas harus jelas. Tanpa menyebutkan tujuan secara jelas perwakafan tidak sah.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh *wākif* tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebabnya adalah ikrar wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan pemilikan seketika itu juga, antara *wākif* dengan wakaf yang bersangkutan.
- 4) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh *wākif* berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

## F. Tinjauan Tentang Nādhir

### 1. Pengertian Nādhir

*Nādhir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazhara*, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *nādhir* adalah *isim fā'il* dari kata *nazhara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan penjaga, pemelihara, pengelola dan pengawas.<sup>25</sup> Dalam berbagai kitab Fiqh *nādhir* disebut juga *mutawalli*, artinya orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf.

Sedangkan secara istilah *nādhir* adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh *wāqif* (orang yang berwaqaf) mengelola wakaf. *nādhir* wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* (orang yang berwaqaf) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan pewakaf (*wākif*), orang yang dipandang sah menjadi *nādhir* adalah orang dewasa, berakal sehat dan beragama Islam.<sup>26</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa *nadhir* adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Mengingat *nadhir* adalah pemegang harta yang pada

dasarnya harus dikelola secara baik demi kepentingan umat dan masyarakat banyak, maka seorang atau beberapa *nadzir* harus yang jujur atau amanah (dapat dipercaya) dan syarat-syarat lainnya.

Dengan demikian *nādhir* berarti orang, organisasi atau badan hukum yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada yang berhak menerimanya, atau mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Dasar hukum mengenai *nādhir* dalam Fiqh Islam dapat dilihat dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam hadis tersebut terdapat perkataan “....Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang *ma'ruf*, dan memakannya tanpa menganggap tanah itu miliknya sendiri”. *Nādhir* inilah yang disebut *mutawalli*. Cara yang *ma'ruf* adalah kadar yang biasanya berlaku. Kekuasaan *nādhir* atau *mutawalli* atas wakaf ialah kekuasaan yang terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola, dan memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan sesuai dengan maksudnya. Jika pada suatu wakaf itu tidak ada *mutawalli*, maka karena jabatannya hakim dapat bertindak sebagai pengawas. Di Indonesia dahulu dilakukan oleh penghulu atau jawatan agama.<sup>27</sup>

## 2. Kedudukan *Nādhir*

Praktek wakaf dan perwakafan yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta benda wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya bahkan beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal demikian terjadi karena ketidakmampuan *nādhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf di samping kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran harta wakaf.

Dari penjelasan tersebut, tampaklah bahwa dalam perwakafan *nādhir* memegang peranan yang sangat penting. Walaupun para ulama tidak menjadikan *nādhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wākif* harus menunjuk *nādhir* wakaf (pengawas wakaf) baik *nādhir* tersebut *wākif* sendiri ataupun *mauqūf alaih*.<sup>28</sup>

Pentingnya kedudukan *nādhir* dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *nādhir* untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf

sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdaptarnya harta benda wakaf atas nama *nādhir* tidak membuktikan kepemilikan *nādhir* atas harta benda wakaf, bahkan pergantian *nādhir* tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.<sup>29</sup> Ketentuan tersebut mempertegas bahwa *nādhir* mempunyai peranan penting dalam wakaf. Bila

### 3. Kewajiban dan Hak *Nādhir*

Sebagaimana kedudukannya, *nādhir* dalam perwakafan, baik perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berhak mengelola harta wakaf. Agar terhindar mencari keuntungan pribadi atau penyelewengan dalam pengelolaan harta wakaf maka perlu diperhatikan kewajiban dan hak dari *nādhir*.

Menurut Syihāb al-Dīn Ahmad ibn Hajar al-Haitamī dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarh al-Minhāj*, tugas *nādhir* adalah sebagai berikut:

(ووظيفته) عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على الإحتياط و (الإجارة) بأجرة المثل لغير محجورة إلا أن يكون هو المستحق كما مر بما فيه مبسوطا في الوكالة فراجعه (والعمارة) وكذا الافتراض على الوقف عند الحاجة لكن إن شرط له الواقف أو أذن له القاضي كما في الروضة وغيرها وإن نازع فيه البلقيني وغيره سواء مال نفسه وغيره قال الغزي وإذا أذن له فيه صدق فيه ما دام ناظرا لا بعد عزله (وتخصيل الغلة وقسمتها) على مستحقيها لأنها المأمودة في مثله.<sup>30</sup>

Artinya: Tugas *nādhir* ketika mutlak adalah menjaga asal wakaf dan kehasilannya dengan hati-hati, mempersewakannya dengan ongkos mitsil untuk selain mahjur, melainkan *nādhir* itu sendiri penerima wakaf, sebagaimana disebutkan dalam perwakilan, membangun bangunan wakaf, mengutang untuk keperluan wakaf di saat diperlukan jika disyaratkan pewakaf atau diizinkan oleh hakim, baik pada hartanya atau orang lain. Oleh karena itu jika ada izin, maka harus dibenarkan *nādhir* di saat dia masih menjadi *nādhir*, tidak sesudah dipecat. Tugas *nādhir* juga mengusahakan hasil dan membaginya kepada penerima wakaf, karena semua itu adalah yang sudah dimaklumi pada misal wakaf.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa tugas *nādhir* adalah menjaga asal wakaf dan kehasilannya dengan hati-hati, mempersewakannya, membangun bangunan wakaf, mengutang untuk keperluan wakaf di saat diperlukan, mengusahakan hasil dan membaginya kepada penerima wakaf.

Menurut Muhammad Amin Suma, tugas dan kewajiban *nādhir* adalah mengelola, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah ditunjuk menjadi *nādhir*, maka ia boleh menyewakan dan/atau mengembangkan benda harta wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf.<sup>31</sup>

### G. Pandangan Fiqh Al-Syāfi'iyyah Tentang Imbalan Nādhir Dari Hasil Pengelolaan Harta Wakaf

*Nādhir* sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh *wāqif* (orang yang berwaqaf) mengelola wakaf. *Nādhir* wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* (orang yang berwaqaf) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan pewakaf (*wākif*), yang merupakan orang dewasa, berakal sehat dan beragama Islam.

Berbicara tentang imbalan *nādhir* terhadap hasil pengelolaan harta wakaf dalam Islam didasari pada hadis sahih Bukhari dan Muslim, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصاب عمر ارضا بخيبر فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يست امره فيها فقال : يا رسول الله اني اصب ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فمات امرني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر : انها لاتبع ولا تهب ولا تورث ؟ وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . (رواه الشيخان)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar RA., dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya, maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya?" Maka kata Rasulullah SAW kepadanya: "Jika engkau suka, tahanlah tanah ini, dan engkau sedekahkan manfaatnya." Maka 'Umar RA pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi

*orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap tanah itu miliknya sendiri. (H.R Bukhari Muslim).<sup>32</sup>*

Hadis ini di antaranya membicarakan tentang harta wakaf dapat diurus dengan cara dipelihara atau dikelola oleh orang atau badan hukum tertentu (*nādhir*). Kemudian *nādhir* dapat mengambil sebagiannya untuk keperluan dalam mengurusnya dan tidak berlebihan (*ma'ruf*).<sup>33</sup>

Agar kelestarian harta wakaf tetap terjaga, maka dalam Syariat Islam diberikan imbalan *nādhir* sebagai imbalan atas jerih payahnya dalam pengurusan wakaf. Dalam menentukan hak bagi *nādhir* Rasulullah SAW menyatakan “Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang *ma'ruf*”, maka tidak berdosa orang yang memelihara harta tersebut memakan dari pada harta wakaf dengan cara patut atau memberi makan saudaranya, tidak untuk menumpuk harta atau memperkaya dirinya.<sup>34</sup>

Mengenai imbalan *nādhir* terhadap hasil pengelolalaan harta wakaf dalam Islam, khususnya *Fiqh al-Syāfi'iyah* telah dijelaskan dengan sangat mendetail dalam kitab-kitab klasik. Di antara ulama *Fiqh al-Syāfi'iyah* yang menjelaskan tentang imbalan *nādhir* terhadap hasil pengelolaan harta wakaf adalah Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fatḥh al-Mu'in*, yaitu:

ويجوز للناظر ما شرط له من الاجرة وإن زاد على أجرة مثله، ما لم يكن الواقف. فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له. نعم له رفع الامر إلى الحاكم ليقدر له الاقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم. وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم.<sup>35</sup>

*Artinya: Boleh bagi nādhir mengambil imbalan yang disyaratkan pewakaf baginya, walaupun melebihi imbalan mitsil selama nādhir bukanlah pewakaf. Namun seandainya pewakaf tidak mensyaratkan imbalan bagi nādhir, maka tidak ada imbalan baginya. Walaupun demikian, nādhir boleh melaporkan permasalahan imbalannya kepada hakim, supaya menetapkan baginya sekurang-kurang dari nafkahnya atau imbalan mitsil, sebagaimana wali anak yatim. Ibnu Shibha' berfatwa bahwa nādhir boleh mengambil sendiri imbalannya tanpa melaporkan permasalahan imbalannya kepada hakim.*

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa *nādhir* boleh mengambil imbalan yang disyaratkan pewakaf baginya, seandainya

pewakaf tidak mensyaratkan imbalan bagi *nādhir*, maka tidak ada imbalan baginya. Imbalan yang diambil adalah sesuai dengan jumlah yang disyaratkan, walaupun melebihi imbalan *mitsil* selama *nādhir* bukanlah pewakaf. Namun jika pewakaf tidak mensyaratkan imbalan bagi *nādhir*, maka *nādhir* boleh melaporkan permasalahan imbalannya kepada hakim, supaya menetapkan baginya sekurang-kurang dari nafkahnya atau imbalan *mitsil*, sebagaimana wali anak yatim. Tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa *nādhir* boleh mengambil sendiri sekurang-kurang dari nafkahnya atau imbalan *mitsil* tanpa melaporkan kepada hakim.

Kemudian dalam syarahnya yang bernama *I'ānah al-Thālibīn* Muḥammad Syatta menerangkan bahwa maksud dari Zain al-Dīn al-Malibārī dalam kitab *Fatḥh al-Mu'in* adalah sebagai berikut:

(قوله: ويجوز للناظر ما شرط له) أي أخذ ما شرط له، (وقوله: من الاجرة) بيان لما (قوله: وإن زاد) أي ما شرط له، وهو غاية للجواز (قوله: ما لم يكن الواقف) أي ما لم يكن الناظر هو الواقف، وهو قيد في الغاية أي أن جواز أخذ الزائد ما لم يكن الناظر هو الواقف، فإن كان هو فلا يجوز أن يأخذ إلا أجره المثل أو أقل، وفي الروض وشرحه، وللناظر من غلة الوقف ما شرطه الواقف وإن زاد على أجره المثل وكان ذلك أجره عمله. نعم، إن شرطه لنفسه تقيد ذلك بأجره المثل، كما مر، فإن عمل بلا شرط فلا شيء له. اهـ (فإن لم يشرط له) أي للناظر، (وقوله: فلا أجره له) أي لأنه إنما عمل مجانا (قوله: نعم الخ) استثناء من عدم ثبوت أجره له إذا لم يشرط له شيء: أي لا يثبت له أجره إلا إن رفع الأمر إلى الحاكم وطلب منه أن يقرر له الأقل من نفقته أو أجره مثله، فإنه إذا قرره فيه يستحقه ويثبت له (قوله: كولي اليتيم) أي فإنه إذا تبرع بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجره فإنه يستحقها إذا قررها له (قوله: وأفتى ابن الصباغ بأن له) أي للناظر، (وقوله: الاستقلال بذلك) أي بأخذ الأقل من نفقته وأجره مثله.<sup>73</sup>

*Artinya: Boleh bagi nādhir mengambil imbalan yang disyaratkan pewakaf baginya, walaupun melebihi imbalan mitsil selama nādhir bukanlah pewakaf. Jika yang menjadi nādhir adalah pewakaf, maka imbalannya adalah imbalan mitsil atau lebih kurang lagi. Tersebut dalam kitab al-Raudh dan syarahnya bahwa "boleh bagi nādhir mengambil kehasilan wakaf yang disyaratkan pewakaf baginya walau melebihi imbalan mitsil yang merupakan ongkos pekerjaannya. Namun jika nādhir yang disyaratkan adalah pewakaf, maka imbalannya harus imbalan mitsil. Jika nādhir bekerja tanpa disyaratkan imbalannya, maka nādhir tidak boleh mengambil imbalannya". Namun seandainya pewakaf tidak*

*mensyaratkan imbalan bagi nādhir, maka tidak ada imbalan baginya, karena nādhir bekerja dengan cuma-cuma. Walaupun demikian, artinya jika nādhir bekerja tanpa disyaratkan imbalan sehingga tidak ada imbalan baginya, melainkan nādhir melaporkan dan meminta menetapkan imbalannya kepada hakim, maka jika hakim menetapkan baginya sekurang-kurang dari nafkahnya atau imbalan mitsil, maka nādhir berhak menerimanya, sebagaimana wali anak yatim, yaitu jika wali menjaga harta anak yatim dan melaporkan pada hakim supaya menetapkan imbalannya, maka wali mendapatkan apa yang ditetapkan oleh hakim. Ibnu Shibha' berfatwa bahwa nādhir boleh mengambil sendiri imbalannya tanpa melaporkan kepada hakim, artinya mengambil sendiri sekurang-kurang nafkahnya atau imbalan mitsil.*

Dari penjelasan Muḥammad Syatta dapat diketahui bahwa jika yang menjadi nādhir adalah pewakaf, maka imbalannya adalah imbalan *mitsil* atau lebih kurang lagi. Jika nādhir bekerja tanpa disyaratkan imbalannya, maka nādhir tidak boleh mengambil imbalannya, melainkan nādhir melaporkan dan meminta menetapkan imbalannya kepada hakim, maka jika hakim menetapkan baginya sekurang-kurang dari nafkahnya atau imbalan *mitsil*, maka nādhir berhak menerimanya.

Syihāb al-Dīn Ahmad al-Qulyūbī dalam kitab *Hasyiyah Qulyūbī*, juga menjelaskan bahwa:

(اتبع شرطه) أي في استحقاقه التظر وكذا فيما شرط له من ريع الوقف وهو أجره المثل في الواقف وفي غيره مطلقاً، فإن لم يشترط له شيء فهو متبرع، إلا إن فرض له الحاكم أجره المثل بعد رفعه له، فإن أخذ شيئاً من مال الوقف قبل ذلك أو بعده بغير ما قتر له ضمنه، ولا يبرأ إلا برده للقاضي، وخرج بذلك ما يؤخذ ضيافة أو حلوانا فقال شيخنا الرملي بجوازه نظراً للعادة ومنعه شيخنا الزياتي ويظهر أنه إن بذله دافعه عن طيب نفس بلا إكراه وبلا خوف زوال الوقف عنه، وبلا نقص أجره وقفه جاز وإلا فلا.<sup>٧٣</sup>

*Artinya: Diikutkan syarat berhakannya nādhir dalam mengelola harta wakaf, sedemikian diikutkan pada imbalan yang disyaratkan baginya dari hasil harta wakaf, yaitu imbalan mitsil pada pewakaf dan mutlak pada selainnya. Jika tidak disyaratkan imbalan, maka nādhir bekerja secara cuma-cuma, melainkan ditentukan oleh hakim imbalan mitsil setelah melaporkannya. Jika nādhir mengambil imbalan dari harta sebelum ada keputusan hakim atau sesudahnya, namun tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka nādhir harus membayarnya, dan tidak akan terlepas melainkan dengan mengembalikannya kepada hakim. Tidak mengapa*

*jika mengambil untuk menjamu atau hadiah sebagaimana pendapat guru kita Al-Ramlī dengan boleh demikian, karena melihat pada kebiasaan, dan membantahnya oleh guru kita Ibn Ziyādī. Pendapat itu jelas boleh bila pemberinya dengan kerelaan hati tanpa peksaan atau takut hilang wakaf darinya, atau mengurangi imbalan wakafnya, jika tidak demikian, maka tidak boleh.*

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa semua syarat yang diajukan pewakaf harus diikuti, termasuk berhaknya *nādhir* dalam mengelola harta wakaf dan imbalan yang disyaratkan baginya dari hasil harta wakaf. Imbalan itu adalah imbalan *mitsil* bila *nādhir* adalah pewakaf itu sendiri dan mutlak pada selainnya. Namun jika tidak disyaratkan imbalan, maka *nādhir* bekerja secara cuma-cuma, melainkan ditentukan oleh hakim imbalan *mitsil* setelah melaporkannya. Sehingga jika *nādhir* mengambil imbalan dari harta wakaf itu sebelum ada keputusan hakim atau sesudahnya namun tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka *nādhir* harus membayarnya dengan mengembalikannya kepada hakim.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Syihāb al-Dīn Ahmad ibn Hajar al-Haitamī dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarh al-Minhāj*, yaitu:

وللتأخر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف كما مر، فإن لم يشترط له شيء فلا أجرة له، نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرّر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كوليّ اليتيم ولأته الأخط للوقف، وأفتى ابن الصبّاح بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم.<sup>83</sup>  
*Artinya: Boleh bagi nādhir mengambil imbalan yang disyaratkan baginya, walaupun melebihi imbalan mitsil selama nādhir bukanlah pewakaf, sebagaimana telah lalu. Maka jika tidak disyaratkan imbalan bagi nādhir, maka tidak ada imbalan baginya. Namun, nādhir boleh melaporkan imbalannya kepada hakim, supaya menetapkan baginya sekurang-kurang dari nafkahnya atau imbalan mitsil, sebagaimana wali anak yatim, supaya lebih hati-hati bagi wakaf. Ibnu Shibha' berfatwa bahwa nādhir boleh mengambil sendiri imbalannya tanpa melaporkan permasalahan imbalannya kepada hakim.*

Dari pendapat di atas juga dapat diketahui bahwa *nādhir* boleh mengambil imbalan yang disyaratkan baginya sesuai dengan jumlah yang disyaratkan, walaupun melebihi *mitsil* selama *nādhir* bukan pewakaf. Jika tidak disyaratkan imbalan, maka tidak ada imbalan baginya. Namun *nādhir* boleh melaporkan imbalannya kepada hakim, supaya menetapkan baginya sekurang-kurang dari nafkahnya atau

imbalan *mitsil*.

Kemudian dalam syarahnya yang bernama *Hawāsyi al-Syarwānī A'la Tuhfah al-Muhtāj Bisyarḥ al-Minhāj*, Abdul Hamid al-Syarwānī menerangkan bahwa maksud dari Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Hajar al-Haitamī dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarḥ al-Minhāj* adalah sebagai berikut:

قوله: (فلا أجرة له) قال شيخنا الزيايدي بعد ما ذكر وليس له أي الناظر أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله على عمارته أو على المستحقين وهو ظاهر أه ع ش وممر عنه ما نصه ومحلّه ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الاشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر اه وقوله غرامة شيء أي أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي في ظاهر الشرع فقط, قوله: (ليقرر له) أي وإن كان من جملة المستحقين في الوقف أه ع ش قوله: (الاقبل الخ) عبارة المغني ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرع الولي بحفظ مال الطفل فرفع الامر إلى القاضي ليثبت له أجرة اه قوله: (كولي اليتيم) قال الشيخ الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كان أكثر من النفقة وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه سواء كان وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر اه نهاية قال ع ش قوله م ر الظاهر الخ معتمد وقوله انه أي الناظر وقوله ثم أي في الولي اه.<sup>٩٣</sup>

Artinya: Berkata Ibn Ziyādi "nādhir tidak boleh mengambil imbalan dari harta, jika nādhir mengambilnya, maka nādhir tidak akan terlepas, melainkan dengan mengembalikannya kepada hakim, ini merupakan pendapat kuat". Maksudnya adalah nādhir tidak akan terlepas dengan mempergunakan gantinya untuk membangun harta wakaf, atau membeginya kepada penerima wakaf. Pendapat ini adalah di saat nādhir tidak takut dalam melaporkan kepada hakim terhadap membayar sesuatu, maka jika demikian, nādhir boleh mempergunakannya dengan mempersaksikan, jika tidak dipersaksikan, maka tidak terlepas pula, karena ketiadaan saksi itu jarang terjadi. Maksud membayar sesuatu adalah dicabutkan harta wakaf dari nādhir. Maksud tidak terlepas adalah pada dhahirnya saja.

Dari penjelasan Abdul Hamid al-Syarwānī dapat diketahui bahwa berdasarkan pendapat kuat, *nādhir* tidak boleh mengambil imbalan dari harta wakaf jika tidak disyaratkan imbalan oleh pewakaf. Jika *nādhir* tetap mengambilnya, maka *nādhir* tidak akan terlepas secara dhahirnya walaupun dengan mempergunakan gantinya untuk membangun harta wakaf, atau membeginya kepada penerima wakaf,

melainkan dengan mengembalikannya kepada hakim, jika *nādhir* tidak takut dalam melaporkan kepada hakim terhadap dicabutkannya harta wakaf darinya, maka *nādhir* boleh mempergunakannya dengan mempersaksikannya pada saksi tertentu.

Selanjutnya, Sulaiman al-Bujairimī dalam kitab *Hasyiyyah al-Bujairimī 'Ala Fath al-Wahhab*, juga menjelaskan bahwa:

(قوله: اتبع شرطه) أي في استحقاقه النظر وكذا فيما شرط له من ريع الوقف وهو أجره المثل في الوقف وفي غيره مطلقاً، فإن لم يشرط له شيء فهو متبرع إلا إن فرض له الحاكم أجره المثل بعد رفعه له فإن أخذ شيئاً من مال الوقف قبل ذلك أو بعده بغير ما قرّر له ضمنه ولا يبرأ إلا برده للقاضي، وخرج بذلك ما يؤخذ ضيافة أو حلوانا فقال شيخنا الرملي بجوازه نظراً للعادة ومنعه شيخنا زي، ويظهر أنه إن بذله دافعه عن طيب نفس بلا إكراه وبلا خوف زوال الوقف عنه وبلا نقص أجره وقفه جاز وإلا فلا.

*Artinya: Diikuti syarat berhak nya nādhir dalam mengelola harta wakaf, sedemikian diikuti pada imbalan yang disyaratkan baginya dari hasil harta wakaf, yaitu imbalan mitsil pada pewakaf dan mutlak pada selainnya. Jika tidak disyaratkan imbalan, maka nādhir bekerja secara cuma-cuma, melainkan ditentukan oleh hakim imbalan mitsil setelah melaporkannya. Jika nādhir mengambil imbalan dari harta sebelum ada keputusan hakim atau sesudahnya, namun tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka nādhir harus membayarnya, dan tidak akan terlepas melainkan dengan mengembalikannya kepada hakim. Tidak mengapa jika mengambil untuk menjamu atau hadiah sebagaimana pendapat guru kita Al-Ramlī dengan boleh demikian, karena melihat pada kebiasaan, dan membantahnya oleh guru kita Ibn Ziyādī. Pendapat itu jelas boleh bila pemberinya dengan kerelaan hati tanpa peksaan atau takut hilang wakaf darinya, atau mengurangi imbalan wakafnya, jika tidak demikian, maka tidak boleh.*

Melihat pendapat Sulaiman al-Bujairimī, maka dapat diketahui bahwa pendapat ini sesuai dengan dengan pendapat Syihāb al-Dīn Aḥmad al-Qulyūbī dalam kitab *Hasyiyyah Qulyūbi*, yaitu syarat yang diajukan pewakaf tentang imbalan bagi *nādhir* dari hasil harta wakaf harus diikuti. Imbalan itu *mitsil* bila *nādhir* adalah pewakaf itu sendiri dan mutlak pada selainnya. Namun jika tidak disyaratkan imbalan, maka *nādhir* bekerja secara cuma-cuma, melainkan ditentukan oleh hakim imbalan *mitsil* setelah melaporkannya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *nādhir*

dapat mengambil imbalan terhadap hasil pengelolaan harta wakaf jika disyaratkan imbalan baginya. Sedangkan jika tidak disyaratkan imbalan, maka *nādhir* bekerja secara cuma-cuma, melainkan melaporkannya kepada hakim, kemudian hakim menentukan imbalan *mitsil* atau ukuran nafkahnya.

Namun demikian, jika harta wakaf tidak mempunyai *nādhir* sehingga diambil alih oleh hakim wilayah tersebut, maka hakim tidak berhak mengambil imbalan dari hasil harta wakaf tersebut. Hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fatḥh al-Mu'in*, yaitu:

قال السبكي: ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا أن صرح الواقف بنظره كما أنه ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة، قال ابنه التاج: ومحلّه في قاض له قدر كفايته. وبحث بعضهم أنه لو خشى من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه: أي إن عرفها، وإلا فوضه لفقيره عارف بها أو سأله وصرّفها.<sup>14</sup>

*Artinya: Al-Subkī berkata "tidak boleh bagi hakim mengambil imbalan yang disyaratkan bagi nādhir, melainkan pewakaf menegaskan dengan pengelolaan harta wakaf oleh hakim, sebaagimana tidak boleh bagi hakim mengambil bagian dari pekerja zakat. Berkata anaknya Al-Tāj "artinya hakim yang mendapatkan gaji yang cukup kebutuhannya". Sebagian ulama membahas bahwa jika ditakutkan terhadap hakim yang memakan harta wakaf karena fasiknya, maka pemegang harta wakaf boleh mempergunakan harta wakaf pada tempatnya jika diketahui, jika tidak diketahui maka diserahkan pada orang faqih yang mengerti dengan tempat harta wakaf atau memintanya dan mempergunakan harta wakaf pada tempatnya.*

Dari pernyataan Zain al-Dīn al-Malibarī dapat diketahui bahwa bile yang mengelola harta wakaf adalah hakim, maka tidak boleh baginya mengambil imbalan yang disyaratkan bagi *nādhir*, melainkan melainkan pewakaf menegaskan dengan pengelolaan harta wakaf oleh hakim atau hakim tersebut tidak mendapatkan gaji yang cukup kebutuhannya. Bahkan jika ditakutkan terhadap hakim yang memakan harta wakaf, maka pemegang harta wakaf boleh mempergunakan harta wakaf pada tempatnya jika diketahui, atau menyerahkan pada orang faqih yang mengerti, atau memintanya dan mempergunakan harta wakaf pada tempatnya.

Dalam menjelaskan pendapat di atas, Muḥammad Syatta juga berkomentar bahwa:

(قوله: قال السبكي ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر) أي ليس للقاضي أن يأخذ ما شرطه الواقف للناظر من الغلة فيما إذا فسق الناظر مثلا وانتقل النظر للقاضي (قوله: إلا إن صرح الواقف بنظره) أي إلا إن صرح الواقف في حال الوقف بأن النظر يكون للقاضي، فإنه يصح له أخذ ما شرط للنظر (قوله: كما أنه ليس الخ) الكاف للتنظير، أي نظير أنه ليس للقاضي أخذ شيء من سهم عامل الزكاة، وذلك لأن رزق القاضي في سهم المصالح (قوله: قال ابنه) أي السبكي وقوله ومحله، أي محل عدم جواز أخذ ما شرط للناظر إذا لم يصرح الواقف بالنظر له. وقوله في قاض له قدر كفايته: أي من بيت مال المسامين (قوله: ويبحث بعضهم أنه) أي الحال والشأن. وقوله لو خشى، بالبناء للمجهول، أي خيف وقوله أكل الوقف، أي غلته، وقوله لجوره، أي القاضي، أي خيف منه ذلك لكونه جائرا، أي ظلما (قوله: جاز الخ) جواب لو. وقوله لمن هو بيده، أي للشخص الذي ذلك الوقف تحت يده، وقوله صرفه، أي الوقف، وهو فاعل جاز، وقوله في مصارفه، أي الوقف كالفقراء (قوله: إن عرفها) أي إن عرف من هو تحت يده مصارفه (قوله: وإلا) أي وإن لم يعرفها (قوله: فوضه) أي الصرف. وقوله الفقيه عارف بها، أي بالمصارف (قوله: أو سأله) أي سأل الفقيه العارف بها عن المصارف. وقوله وصرفها، الأولى وصرفه، لأن الضمير عائد على الوقف، ويحتمل أن المراد وصرفها، أي غلته المعلومة من المقام.<sup>24</sup>

*Artinya: (Al-Subkī berkata "tidak boleh bagi hakim mengambil imbalan yang disyaratkan bagi nādhir), artinya tidak boleh bagi hakim mengambil imbalan yang disyaratkan pewakaf bagi nādhir dari hasil harta wakaf, jika fasik nādhir dan berpindah kepada hakim (melainkan pewakaf menegaskan dengan pengelolaan harta wakaf oleh hakim), artinya melainkan pewakaf ketika mewakafkan menegaskan dengan pengelolaan harta wakaf oleh hakim, maka boleh baginya mengambil imbalan yang disyaratkan bagi nādhir (sebagaimana tidak boleh bagi hakim mengambil bagian dari pekerja zakat), karena imbalan hakim terdapat pada kemashlahatan orang Islam. (Berkata anaknya Al-Tāj al-Subkī "hakim yang mendapatkan gaji yang cukup kebutuhannya"), artinya hakim tidak boleh mengambil imbalan yang disyaratkan pewakaf bagi nādhir yang mendapatkan gaji yang cukup kebutuhannya dari baitil mal. (Sebagian ulama membahas) bahwa jika ditakutkan terhadap hakim yang memakan harta wakaf karena fasiknya, artinya zalim, (maka pemegang harta wakaf boleh mempergunakan harta wakaf pada tempatnya, seperti fakir miskin (jika diketahui) tempatnya, (jika tidak diketahui) tempatnya, (maka diserahkan pada orang faqih yang mengerti) dengan tempat harta wakaf atau memintanya dan mempergunakan harta wakaf pada tempatnya.*

Dalam penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hakim tidak boleh mengambil imbalan yang disyaratkan bagi *nādhir* dari hasil harta wakaf di saat tidak ada *nādhir* atau *nādhir* fasik dan berpindah kepada hakim, melainkan pewakaf menegaskan dengan pengelolaan harta wakaf oleh hakim, maka boleh baginya mengambil imbalan yang disyaratkan bagi *nādhir*, karena hakim mendapatkan gaji yang cukup kebutuhannya dari baitil mal.

#### **H. Kesimpulan**

Dari semua pendapat dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa imbalan *nādhir* terhadap hasil pengelolaan harta wakaf dalam *Fiqh al-Sāfi'iyah* didasari pada hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar RA yang di antara isinya membicarakan tentang harta wakaf dapat diurus dengan cara dipelihara *nādhir*. Kemudian *nādhir* dapat mengambil sebagiannya untuk keperluan dalam mengurusnya dengan cara yang *ma'ruf*. Dalam hal ini *Fiqh al-Syāfi'iyah* menyatakan bahwa *nādhir* wakaf berhak mendapatkan imbalan, jika pewakaf mensyaratkan mengambil imbalan baginya, atau ditetapkan oleh hakim setelah *nādhir* melaporkan permasalahan imbalannya.

Bila imbalan itu disyaratkan pewakaf, *nādhir* boleh mengambil jumlah imbalan secara mutlak sebagaimana ditentukan dalam syarat walaupun melebihi imbalan *mitsil* selama *nādhir* bukanlah pewakaf, kalau *nādhir* adalah pewakaf itu sendiri, maka hanya boleh mengambil imbalan *mitsil* atau lebih kurang lagi. Sedangkan imbalan yang ditetapkan oleh hakim adalah sekurang-kurang dari nafkahnya atau imbalan *mitsil*.

Seandainya *nādhir* mengambil imbalan dari harta wakaf tanpa disyaratkan pewakaf atau sebelum ada keputusan hakim ataupun sesudahnya namun tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka *nādhir* tidak akan terlepas secara dahirnya walaupun dengan mempergunakan gantinya untuk membangun harta wakaf, atau membaginya kepada penerima wakaf, melainkan dengan mengembalikannya kepada hakim, jika *nādhir* tidak takut terhadap dicabutkannya harta wakaf darinya, maka *nādhir* boleh mempergunakannya dengan mempersaksikannya pada saksi tertentu.

Namun demikian, jika harta wakaf tidak mempunyai *nādhir* sehingga diambil alih oleh hakim wilayah tersebut, maka hakim tidak berhak mengambil imbalan dari hasil harta wakaf tersebut,

melainkan pewakaf menegaskan dengan pengelolaan harta wakaf oleh hakim atau hakim tersebut tidak mendapatkan gaji yang cukup kebutuhannya dari baitil mal.

## Endnotes

- <sup>1</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), h. 1.
- <sup>2</sup> Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburī, *Al-Jamī' al-Shahīh: Shahīh Muslim*, Juz. Ke-5, (Bairut: Dār al-Khail, t.t), h. 72
- <sup>3</sup> Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in*, Juz. III, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 157.
- <sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nādhir)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), h. 37.
- <sup>5</sup> Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in ...*, h. 186.
- <sup>6</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, Cet. IV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1576.
- <sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Cet. I, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 1.
- <sup>8</sup> Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 42.
- <sup>9</sup> Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in*, Juz. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 156.
- <sup>10</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10.
- <sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 66.
- <sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- <sup>13</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h.14.
- <sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. III, (Bandung: Diponegoro, 2000), h.113.
- <sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, h. 272.
- <sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, h. 34.
- <sup>17</sup> Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburī, *Al-Jamī' al-Shahīh: Shahīh Muslim*, Juz. V, (Bairut: Dār al-Khail, t.t), h. 72.
- <sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 241.
- <sup>19</sup> Muslich Sabir, *Koleksi Hadis Yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Jld. II, Cet. III, (Semarang: Al-Ridha,1999), h. 160.
- <sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf ...*, h. 12-13.
- <sup>21</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 15.
- <sup>22</sup> Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb ...*, h. 45.
- <sup>23</sup> Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb ...*, h. 45.
- <sup>24</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 241.
- <sup>25</sup> M. Idris al-Marbawī, *Kamus Idris al-Marbawī Arabī-Melāyu*, (Indonesia: Dār al-Ihyā al-Kutūb, t.t), h. 326.
- <sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam ...*, h. 143.
- <sup>27</sup> M. Hasballah Thaib, *Fiqh Waqaf*, Cet. I, (Medan: UI Press, 2003), h. 75.
- <sup>28</sup> Tahir Azhary, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), h. 116.
- <sup>29</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- <sup>30</sup> Syihāb al-Dīn Ahmad ibn Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarḥ al-Minhāj*, Juz. VI, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), h. 331.
- <sup>31</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam ...*, h. 143.
- <sup>32</sup> Muslich Sabir, *Koleksi Hadis Yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Jld. II, Cet. III,

*Pandangan Fiqh Al-Syāfi'iyah Tentang Imbalan Nādhir Dari Hasil Pengelolaan Harta Wakaf*

(Semarang: Al-Ridha, 1999), h. 160.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Cet. I, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 13.

<sup>34</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 117.

<sup>35</sup> Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in*, Juz. III, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 186.

<sup>36</sup> Muḥammad Syatta, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz. III, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 186.

<sup>37</sup> Syihāb al-Dīn Aḥmad al-Qulyūbī, *Ḥasyiyah Qulyūbi*, Jil. III, (Singapura: Al-Haramain, t.t),

<sup>38</sup> Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muhtāj Bisyarḥ al-Minhāj*, Juz. VI, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), h. 333.

<sup>39</sup> Abdul Hamīd al-Syarwānī, *Ḥawāsyi al-Syarwānī A'la Tuḥfah al-Muhtāj Bisyarḥ al-Minhāj*, Juz. VI, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), h. 333.

<sup>40</sup> Sulaiman al-Bujairimī, *Ḥasyiyah al-Bujairimī 'Ala Fath al-Wahhab*, Juz. III, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), h. 213.

<sup>41</sup> Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in* ..., h. 185.

<sup>42</sup> Muḥammad Syatta, *I'ānah al-Thālibīn* ..., h. 185.